

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu

Rossa (2015), Menguji pengaruh pengendalian internal, akuntabilitas, tekanan eksternal, dan kepemimpinan terhadap transparansi pelaporan keuangan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan secara tertib, sehingga dapat lebih baik lagi kedepannya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pejabat eselon IV Pemerintah Kota Pekanbaru dan pejabat akuntan. Peneliti mengumpulkan data dengan menyebarkan 96 kuesioner kepada 32 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dengan bantuan program komputer versi SPSS 17.0, regresi berganda (Multiple Regression) dan regresi sedang (Moderate regression analysis -MRA) digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal, akuntabilitas, tekanan eksternal dan komitmen pimpinan berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Noprizal (2017), Untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, dan pemerintah terhadap sistem pengendalian internal untuk mencapai implementasi transparansi keuangan dalam pengelolaan pelaporan di Kantor Kabupaten Indragiri Hulu. Sampel ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Narasumber yang menjadi sampel penelitian ini adalah para kepala bagian keuangan, bendahara dan pejabat keuangan (87 orang yang diwawancarai) yang bekerja di masing-masing instansi di sekitar kantor SKPD di Kabupaten Hulu Indragiri yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar. Analisis tersebut didasarkan pada jawaban responden atas kuesioner yang disebar oleh peneliti. Menggunakan SPSS untuk melakukan analisis mekanis dari analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen

manajemen, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan. Besar kecilnya pengaruh (R^2) dari tekanan eksternal, komitmen manajemen dan pengendalian internal pemerintah terhadap penerapan sistem pelaporan transparansi keuangan adalah 76,6%, sedangkan sisanya 23,4% dipengaruhi oleh variabel eksternal lainnya.

Wintari dan Suardana (2018), Dalam era otonomi daerah saat ini, transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah menjadi sangat penting. Masyarakat berharap otonomi daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai dampak tekanan eksternal, pengendalian internal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen organisasi terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan organisasi daerah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan survei kuesioner. Kuesioner telah diserahkan kepada Unit Kerja Instrumen (OPD) di Kota Denpasar. Gunakan pengambilan sampel yang bertujuan untuk pengumpulan sampel. Responden yang mengisi kuesioner berjumlah 90 orang. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal, pengendalian internal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Fardian (2014), Di Indonesia, kajian tentang penerapan transparansi pelaporan keuangan masih sangat sedikit dan terbatas. Berdasarkan survey yang dilakukan di kota padang, teoretis pengembangan dan interpretasi penelitian ini diambil dari teori kelembagaan. Sampel ini terdiri dari 16 SKPD yang memiliki format jurusan di Pemerintahan Kota Padang. Penelitian ini menggunakan kualitatif. Partial Least Square (PLS) digunakan untuk menganalisis model dan hubungan yang diusulkan. Kandungan analisis digunakan untuk menggunakan fenomena isomorfisme yang terjadi dalam implementasi transparansi pelaporan keuangan. Studi ini memberikan bukti bahwa penerapan transparansi pelaporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang dipengaruhi oleh ketidakpastian

lingkungan, dan komitmen manajemen.

Julita dan Belian (2018), Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tekanan eksternal, komitmen manajemen dan ketidakpastian lingkungan terhadap transparansi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada bagian pengelola keuangan tiap SKPD. Pengolahan dan Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS 17. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan dan komitmen manajemen berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Sedangkan tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Fatmaningrum dan Mukti (2019), Untuk mengetahui pengaruh ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, eksternal tekanan, pengendalian internal, dan komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di organisasi pemerintah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengambilan sampel dengan tujuan tertentu metode yang diterapkan dalam penelitian ini sedangkan kriteria sampel adalah Organisasi Perangkat Daerah berbentuk jasa, dan aset keuangan daerah dengan total 103 Organisasi Perangkat Daerah. Jenis data yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan data primer. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan menggunakan software SPSS v.15 aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan ketidakpastian, akuntabilitas, tekanan eksternal, internal kontrol, dan komitmen manajemen secara positif mempengaruhi pelaksanaan pelaporan keuangan transparansi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Institusional (Institutional Theory)

Teori institusional didasari pada pemikiran untuk bertahan hidup. Teori ini bisa digunakan untuk menjelaskan tindakan dan juga pengambilan keputusan didalam organisasi publik tersebut. Menurut Setyowati (2017) sebuah organisasi diwajibkan untuk mampu meyakinkan kepada publik bahwa organisasi merupakan

entitas secara resmi, dan layak untuk dikembangkan. Teori institusional muncul sebagai penjelas yang kuat, baik untuk tindakan-tindakan individu maupun organisasi yang disebabkan oleh faktor eksternal, faktor sosial, faktor ekspektasi masyarakat dan faktor lingkungan (Ridha & Basuki, 2012).

Teori institusional berpendapat bahwa organisasi yang mengutamakan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada lingkungan eksternal atau lingkungan sosial dimana organisasi berada. Penyesuaian pada lingkungan eksternal dan lingkungan sosial mengakibatkan timbulnya kecenderungan organisasi untuk memisahkan kegiatan internal mereka. Organisasi sektor publik yang memperoleh legitimasi akan cenderung memiliki kesamaan atau isomorfisme dengan organisasi lain.

2.2.2 Teori Signaling

Teori signaling menjelaskan tentang pemberian signal oleh manajemen yang tujuannya untuk mengurangi asimetri informasi (Lo 2012). Maka dari itu, apabila manajemen mengetahui tentang kondisi keuangan yang sesungguhnya daripada stakeholder, maka manajemen bisa memberikan sinyal dengan mencatat akrual diskresioner.

2.2.3 Transparansi Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah penerapan transparansi adalah cara mendapatkan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Keterbukaan informasi akan membuka ruang transaksi sosial antara stakeholder dan pemerintahan (Iswahyudi dkk,2016).

Transparansi dapat berupa agar semua pemangku kepentingan dapat melihat struktur dan fungsi pemerintah, tujuan kebijakan dan rencana fiskal, serta laporan pertanggungjawaban selama periode waktu yang lalu. Transparansi dilandasi oleh kebebasan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam masyarakat, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat langsung didapatkan oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2010).

Andriyani (2016) mengemukakan pendapat tentang transparansi laporan keuangan, yang mengharuskan organisasi untuk menyampaikan informasi kepada pihak eksternal, dan informasi yang diberikan juga harus menghindari pernyataan palsu yang utama. Dengan demikian, mereka yang membutuhkan informasi terkait kepentingan publik dapat memperoleh informasi secara langsung dan mudah.

Transparansi adalah memberikan informasi pertimbangan bahwa masyarakat telah memilih hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh, yaitu tanggung jawab pemerintah untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhan terhadap peraturan (KNKG, 2010).

Dengan informasi tersebut, masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan, sehingga kebijakan publik yang muncul dapat memberikan hasil terbaik bagi masyarakat serta mencegah terjadinya penipuan dan manipulasi yang hanya menguntungkan satu kelompok sosial saja (Silvia,2009).

Menurut Mardiasmo (2010), transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan keuangan daerah agar DPRD dan masyarakat dapat memahami dan memantau kebijakannya tersebut, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan membentuk akuntabilitas horizontal antara pemerintah daerah dengan sistem masyarakatnya sehingga terciptanya pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Smith (2004:66), mengemukakan bahwa proses transparansi meliputi :

1. *Standard procedural requirements* (Persyaratan Standar Prosedur), yaitu proses penyusunan regulasi harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
2. *Consultation processes* (Proses Konsultasi), Adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat.
3. *Appeal rights* (Permohonan Izin), adalah pelindung utama dalam proses pengaturan. Standard dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya korupsi.

Penerapan transparansi di organisasi sektor publik diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak internal (manajemen) dan pihak eksternal (masyarakat). Kemudahan mengakses informasi yang dimiliki oleh pemerintah merupakan satu hal yang menjadi perhatian bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya keterkaitan antara isu-isu mengenai etika, korupsi, dan penyimpangan administrasi dan akuntabilitas (Piotrowski dan Bertelli, 2010). (Silver, 2005) mengatakan bahwa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) menuntut organisasi untuk lebih transparan.

Menurut Ridha dan Basuki (2012) penerapan transparansi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa hal berikut :

- a) Informasi mengenai keberhasilan pencapaian OPD,
- b) Menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu,
- c) Menyediakan akses kepada pemangku kepentingan,
- d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembaran muka laporan keuangan,
- e) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan daerah sebagai berikut :

1. Penyajian Laporan Keuangan
2. Aksesibilitas Laporan Keuangan
3. Pengendalian Internal
4. Tekanan Eksternal
5. Ketidakpastian Lingkungan
6. Komitmen Manajemen
7. Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja

Proses transparansi didalam organisasi tentu berkaitan dengan organisasional theory. Dalam teori organisasi dasar pemikiran utama dari teori tersebut adalah bertahan hidup (*survive*). Teori tersebut menegaskan bahwa tujuan organisasi tidak akan berjalan dengan baik, bila tidak didukung oleh seluruh anggota organisasi.

Pada teori tersebut setiap organisasi memiliki kesamaan yaitu untuk bertahan hidup. Oleh sebab itu masing masing organisasi berusaha menciptakan cara atau strategi untuk menciptakan keunggulan bersaing, salah satunya adalah menciptakan transparansi dalam pembuatan laporan keuangan.

Menurut Silver (2005) mengatakan bahwa pemangku kepentingan (*stakeholders*) menuntut bahwa organisasi untuk menjadi lebih transparan dalam praktiknya, tidak hanya pada jumlah yang di rilis, tapi juga bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya.

2.2.4 Ketidakpastian Lingkungan

Pengertian ketidakpastian lingkungan adalah faktor lingkungan yang dihadapi organisasi. Jika organisasi tidak dapat beradaptasi dengan laju perubahan dan dinamikanya dengan baik, dapat mengganggu kinerja organisasi, termasuk hal-hal seperti tingkat perubahan regulasi, tingkat informasi, perubahan teknologi, tingkat perubahan pasar, dan persaingan Level (Tjahjadi, 2011).

Ketidakpastian lingkungan bisa dijabarkan sebagai faktor-faktor dari dalam maupun luar organisasi yang mungkin berpengaruh terhadap organisasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Setyowati (2017) mengatakan bahwa ketidakpastian lingkungan meliputi perubahan-perubahan regulasi pemerintah, perubahan dinamika masyarakat, dan perubahan di dalam organisasi tersebut.

Ketidakpastian menyebabkan organisasi mengubah proses dan strukturnya (Fardian, 2014). Tidaklah mudah untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan dan perubahan organisasi dalam proses dan struktur yang ada dalam organisasi. Kurangnya persiapan organisasi terhadap standar dalam bentuk regulasi akan menyebabkan kurangnya pemahaman tentang transformasi organisasi menjadi regulasi baru.

Deddi (2013) mengatakan bahwa dalam hal ini ketidakpastian lingkungan mengacu pada situasi dimana SKPD mengalami ketidakpastian, ketidakpastian tersebut dapat disebabkan adanya faktor dari luar SKPD, seperti sering terjadi perubahan regulasi, ketidaksesuaian antar regulasi, terjadinya mutasi staf SKPD dengan cepat dan lain sebagainya. Ketidakpastian mengakibatkan organisasi merubah proses dan strukturnya. Perubahan organisasi baik proses maupun struktur yang ada pada organisasi sebagai respon terhadap ketidakpastian lingkungan tidaklah mudah.

Ketidaksiapan organisasi terhadap suatu standar berupa peraturan akan mengakibatkan rendahnya pemahaman organisasi dalam bertransformasi ke peraturan yang baru. Menurut penelitian Sudybio (2010), mengatakan bahwa masalah umum transparansi laporan keuangan di Indonesia terkait dengan sering terjadinya perubahan dalam politik dan budaya pemerintahan. Faktor yang paling mendasar ketika terjadi perubahan struktur pemerintahan dari rezim orde baru ke masa reformasi.

Keterbukaan didalam berdemokrasi hingga aspek yang lain dilakukan secara gambling, akan tetapi tidak dilakukan secara dewasa. Perubahan lingkungan tentu dapat menciptakan dua kemungkinan, pertama mendorong terjadinya percepatan proses transparansi, atau pun perubahan yang bersifat mendorong melambatnya proses transparansi.

Indikator penilaian ketidakpastian lingkungan adalah persepsi keberhasilan penerapan peraturan dalam praktik transparansi, tingkat keberhasilan penerapan

sistem atau peraturan organisasi serupa dan memberikan informasi keuangan yang positif dan negatif (Rudi (2009), dalam Usman (2012)).

Penelitian Masruroh (2015), Hamdi (2017), dan Yunaz (2017) menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berdampak pada penerapan transparansi laporan keuangan.

Asroel (2016) menggambarkan definisi ketidakpastian lingkungan sebagai beberapa faktor lingkungan yang dihadapi organisasi dan dapat mempengaruhi kinerja ketika organisasi tidak dapat beradaptasi dengan baik dengan kecepatan perubahan dan dinamikanya, termasuk faktor-faktor tingkat perubahan regulasi, tingkat perubahan teknologi informasi, tingkat perubahan harga pasar dan persaingan.

(Fardian, 2014), (Julita dan Berlian, 2015), (Satyaningsih *et al*, 2014) melakukan penelitian sebelumnya tentang dampak ketidakpastian lingkungan terhadap transparansi pelaporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berdampak positif terhadap transparansi laporan keuangan.

2.2.5 Komitmen Pimpinan

Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan komitmen sebagai keinginan untuk memelihara hubungan antara individu dan organisasi serta tujuan mereka dan anggota organisasinya. Pada saat yang sama, Mathis dan Jackson mendefinisikan komitmen organisasi sebagai sejauh mana karyawan percaya dan bersedia menerima tujuan organisasi, dan tetap mempertahankan atau tidak meninggalkan organisasi.

Menurut definisi Sapeni (dalam Silvia, 2013) komitmen dapat diartikan sebagai kecenderungan seseorang untuk merasa aktif dalam suatu kegiatan, harus mampu mengambil keputusan sendiri dan melakukan kegiatan tersebut dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan

organisasi. Hal ini mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya dapat mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi.

Komitmen menurut Maruroh (2015) dapat diartikan sebagai penerimaan yang kuat dari individu yang fokus pada tujuan dan nilai yang terkandung dalam organisasi. Komitmen dapat juga berarti penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, dan individu berupaya serta berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di organisasi tersebut (Sukhemi, 2011:99).

Kebanyakan pemimpin telah memahami bahwa masa depan akan berbeda dengan masa lalu, dan bahwa tingkat daya saing yang telah membawakeberhasilan di waktu yang lalu dapat menjadi bencana di masa depan. Padadasarnya seorang pimpinan dapat melakukan operational commitment dan transformational commitment (Wibowo, 2011). Dengan menjalankan operational commitment, pimpinan memelihara status quo, seperti persetujuan anggaran, penugasan kerja, sebagai pekerjaan rutin pimpinan. Pimpinan mempunyai komitmen untuk menjalankan pekerjaan manajemen pada umumnya.

Sopiah (2008) menyatakan tiga faktor yang mempengaruhi komitmen seorang pimpinan antara lain :

- a) Ciri pribadi pekerja
- b) Ciri pekerjaan
- c) Pengalaman kerja

Menurut Nurkhamid (2008) dalam Silvia (2013), pemimpin memiliki komitmen untuk mengalokasikan sumber daya termasuk waktu, uang dan orang, menugaskan karyawan dan departemen dalam organisasi untuk mengevaluasi kinerja, dan mengumpulkan data yang relevan dan dapat diandalkan sehingga data tersebut dapat digunakan. Dengan menggunakan tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Ukuran komitmen seorang pimpinan yang dalam hal ini adalah

kepala OPD adalah terkait dengan pendelegasian wewenang (empowerment), Pemimpin yang dapat menetapkan tujuan yang jelas berdasarkan sumber daya dan kemampuan mereka sendiri, dan pemimpin yang dapat menyampaikan gagasan mereka kepada anggota.

Kepemimpinan adalah kode etik yang digunakan seseorang ketika mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Gaya kepemimpinan yang tepat akan memotivasi seseorang untuk berprestasi. Berhasil tidaknya karyawan dalam hal prestasi kerja dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan atasannya (Suranta, 2003).

Seorang pemimpin yang produktif dapat memastikan bahwa orang menyelesaikan pekerjaan mereka dengan keterampilan dan komitmen yang diperlukan untuk menghasilkan hasil terbaik, dan semua ini dilakukan dengan pengorbanan uang, waktu dan sumber daya (Lefton dan Buzzotta, 2004).

Pemimpin dapat menuntut budaya risiko, tetapi jika mereka tidak memiliki cukup inspirasi untuk seluruh karyawannya, tidak akan ada perubahan. Kouzes dan Posner (2003) mengatakan bahwa kredibilitas merupakan dasar kepemimpinan. Jika anggota organisasi tidak mempercayai pemimpin, maka mereka tidak akan mempercayai ucapan pemimpinnya, pemimpin adalah panutan, menemukan nilai pribadinya dan bertindak sebagai panutan. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang diilhami tidak hanya untuk memberi perintah (talk less do more), tetapi juga untuk berbicara (talk the talk), tetapi dapat melakukan (walk the talk).

Organisasi dengan komitmen manajemen yang kuat dari pimpinan dan bawahannya maka akan lebih mudah untuk mencapai hasil yang diinginkan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik, dibandingkan dengan organisasi yang tidak memiliki komitmen manajemen. Dengan demikian keberadaan komitmen manajemen yang kuat sangat dibutuhkan organisasi agar dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja serta penggunaan yang lebih baik atas informasi kinerja yang dihasilkan.

2.2.6 Pengendalian Internal

Secara umum, pengendalian internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Definisi awal yang digambarkan oleh Amuel Johnson dalam Amin Widjaja Tunggal (2013) adalah “daftar atau akun yang dimiliki oleh seorang karyawan, dan setiap daftar atau akun tersebut dapat diperiksa oleh karyawan lain.” Sebelumnya digunakan untuk pengendalian internal istilah internal sistem pengendalian, yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengawasan internal dan struktur pengendalian internal. Sejak 2001, istilah resmi IAI adalah pengendalian internal (Sukrisno Agoes, 2012: 100).

Dalam tata kelola pemerintahan, pengendalian internal merupakan bagian penting dari organisasi. Semakin banyak penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintahan maka semakin transparan pengungkapan proses transparansi pelaporan keuangan. Karena sistem pengendalian internal, organisasi dapat membimbing, mengawasi dan mengevaluasi sumber daya dalam organisasi.

Tujuan pengendalian internal adalah untuk membantu manajemen mencapai tujuan organisasi, COSO (2013: 3). Dalam kerangka kerja (*framework*) terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. *Summary Executive* : Menguraikan kerangka pengendalian internal dewan direksi, kepala eksekutif dan manajer senior lainnya.
2. *Framework and Appendices* : Menetapkan kerangka kerja, menentukan pengendalian internal, menjelaskan persyaratan pengendalian internal yang efektif, termasuk komponen dan prinsip pengendalian internal, dan memberikan pedoman bagi manajer di semua tingkatan untuk merancang, menerapkan dan memandu pengendalian internal dan mengevaluasi pengendalian internal serta menilai keefektifitasnya.
3. *Illustrative Tools* : Menyediakan template dan program yang dapat digunakan untuk efektivitas sistem pengendalian internal

Pengendalian internal merupakan bagian dari setiap sistem untuk digunakan sebagai pedoman prosedur dan operasi untuk suatu perusahaan atau organisasi

tertentu (Rossa, 2015). Oleh karena itu sebelum auditor melakukan audit secara mendalam atas informasi yang tercantum dalam laporan keuangan harus memahami terlebih dahulu pengendalian intern. Pengendalian intern (*internal control*) sebagai suatu sarana yang diciptakan oleh dan untuk kepentingan organisasi.

Seperti yang kita ketahui, jika pengendalian internal tersebut terimplementasikan dengan efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang dihasilkan andal, asset milik Negara tetap aman dan peraturan perundang-undangan dijalankan maka akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

2.3 Hubungan antar variabel penelitian

2.3.1 Hubungan Antara Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Pengertian ketidakpastian lingkungan adalah faktor lingkungan yang dihadapi organisasi. Hasil dari penelitian Stewart dan Jensen (2009) menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan, dan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ketidakpastian menciptakan tekanan untuk mendorong keberlangsungan proses transparansi. Ketakutan akan ketidakpastian mendorong transparansi menjadi tindakan.

Hasil penelitian Wintari dan Suardana (2018) menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan mempunyai pengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

Namun hal tersebut tidak konsisten terhadap penelitian yang diungkapkan oleh Nanda Lisriani (2019) dan Henny Indrayani dkk (2017) menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Semakin meningkatnya ketidakpastian lingkungan organisasi akan

mendorong organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga ketika organisasi siap untuk semua situasi, itu akan terjadi meningkatkan transparansi pelaksanaan pelaporan keuangan.

H_1 : Ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

2.3.2 Hubungan Antara Komitmen Pimpinan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Kepemimpinan adalah faktor yang sangat penting, dan juga merupakan faktor penting bagaimana seseorang dapat memimpin kelompok kerja untuk mencapai kesuksesan terbesar.

(Kartono, 2010) mengartikan kepemimpinan sebagai suatu bentuk pemerintahan yang didasarkan pada kemampuan individu, yang dapat mendorong atau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu berdasarkan penerimaan kelompok, dan memiliki keterampilan khusus yang sesuai untuk situasi khusus. Dalam hal ini pemimpin berperan sebagai perencana (planner), pelayan (pengurus rumah tangga) dan guru (teacher) dengan terus menerus membimbing dan mengembangkan bawahan untuk meningkatkan kemampuan kerjanya sehingga tercipta kinerja yang tinggi.

H_2 : Komitmen pimpinan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

2.3.3 Hubungan Antara Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

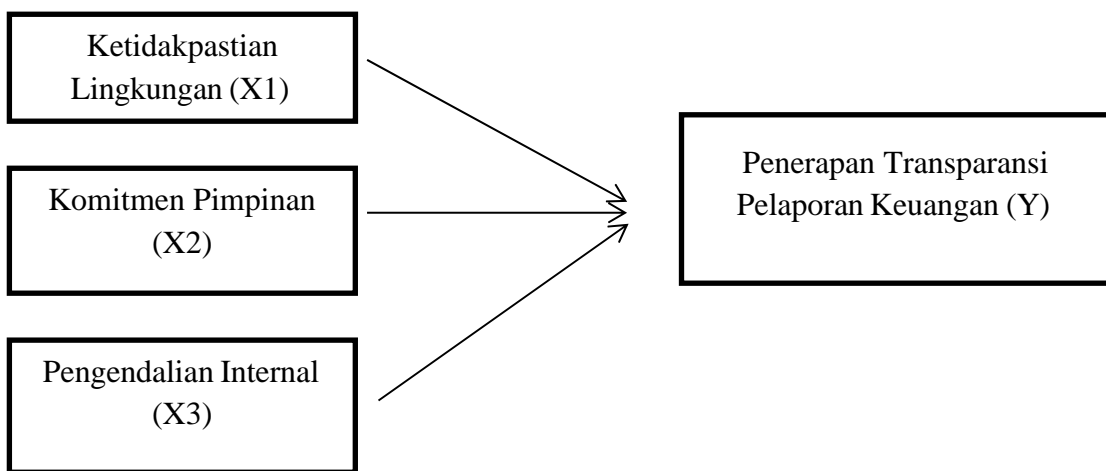
Pengendalian intern yang digunakan dalam sebuah entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas tersebut.

(Sari, 2012), (Amelia, 2015), (Alim 2015), (Hastuti 2015) hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi laporan keuangan berupa sistem dengan cara untuk

mencapai tujuan efektivitas dan efisiensi, keandalan operasi, pelaporan keuangan, dan kepatuhan. hukum dan peraturan yang berlaku yang memicu transparansi pelaporan keuangan memberikan kepercayaan yang cukup.

***H₃* : Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan**

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual